



**WALIKOTA AMBON  
PROVINSI MALUKU**

**KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR 316TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN/PENETAPAN KEPALA SATUAN KERJA PENGELOLA  
KEUANGAN DAERAH SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019**

**WALIKOTA AMBON,**

- Menimbang** : a. bahwa salah satu tugas Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Penunjukan/Penetapan Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80 sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955, tentang Pembentukan Kota Ambon sebagai daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2011 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019);

13. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2018 Nomor 360);
14. Peraturan Walikota Ambon Nomor 55 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun 2019;
15. Surat Perintah Pelaksana Harian Nomor:800/3039/SETKOT Tanggal 02 Mei 2019

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk/Menetapkan Plh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kota Ambon APRIES.B.GASPERSZ.S.STP. M.Si, NIP: 19770403 199602 1 003 Pangkat Pembina Tingkat I Golongan IV/b, selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2019.
- KEDUA** : Pejabat sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu diberikan kewenangan sebagai berikut:
1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
  2. Menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
  3. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  4. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD);
  5. Menyusun laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, dan
  6. Melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Walikota Ambon.
- KETIGA** : Apabila pejabat yang bersangkutan tidak berada ditempat atau berhalangan maka pelimpahan wewenang untuk melaksanakan tugas dimaksud akan ditunjuk sesuai ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT** : Contoh tanda-tangan serta paraf dari pejabat yang ditetapkan diatas sebagaimana terdapat pada lampiran Keputusan ini;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal, 2 - Mei - 2019



WALIKOTA AMBON,

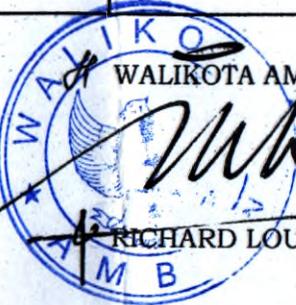
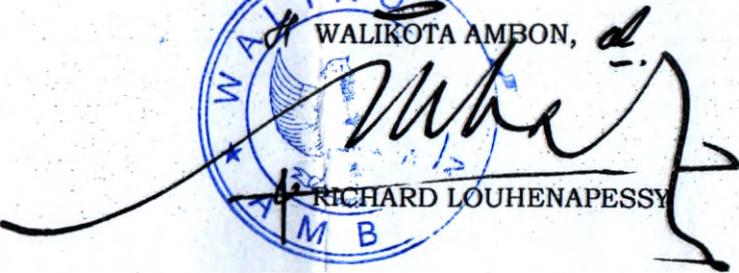
RICHARD LOUHENAPESSTY

Tembusan kepada:

1. Sekretaris Kota Ambon;
2. Inspektur/Kepala Sekretariat DPRD /  
Badan / Dinas / Kantor / Bagian/Kelurahan  
Dalam Lingkup Pemerintah Kota Ambon;
3. Yang Bersangkutan untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR : 316 TAHUN 2019  
TANGGAL : 2 - Mei - 2019  
TENTANG  
PENUNJUKAN/PENETAPAN  
KEPALA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH  
SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2019

No	Nama/Pangkat/Golongan	Jabatan	Selaku	Tanda Tangan	Paraf
1.	APRIES.B.GASPERSZ.S.STP.M.Si Pembina Tingkat I NIP: 19770403 199602 1 003	Plh.Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Ambon	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah		

  
WALIKOTA AMBON,  
  
RICHARD LOUHENAPESSY